



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perkembangan Kerja Sama Ekonomi ASEAN Pasca Pembentukan ASEAN Economic Community (2015–2025)

Bari Laksmana Nugeraha, Bintang Ramadhan Dyni Putra², Evan Auril Atallah³, Raafiul Haqy Sukma⁴, Wan Muhammad Zendi Irfani⁵.

¹Universitas Riau, Riau, Indonesia, bari.laksmana3635@student.unri.ac.id

²Universitas Riau, Riau, Indonesia, bintang.ramadan3174@student.unri.ac.id

³Universitas Riau, Riau, Indonesia, evan.auril3786@student.unri.ac.id

⁴Universitas Riau, Riau, Indonesia, raafiul.haqy3035@student.unri.ac.id

⁵Universitas Riau, Riau, Indonesia, wan.muhammad5121@student.unri.ac.id

Corresponding Author: bari.laksmana3635@student.unri.ac.id¹

Abstract: *This study examines the development of ASEAN economic cooperation after the establishment of the ASEAN Economic Community in 2015, which marked a milestone in regional economic integration. The research focuses on the extent to which ASEAN has progressed toward becoming a single market and production base through increased intra-regional trade, investment flows, and economic interdependence. This study aims to analyze the achievements and limitations of economic integration in ASEAN during the period 2015 to 2025. The research uses a qualitative descriptive-analytical approach based on secondary data from official reports, academic literature, and regional economic publications. The findings show that economic cooperation in ASEAN has improved, particularly in trade liberalization, investment growth, and integration into regional production networks. However, the results also indicate that integration remains incomplete due to persistent non-tariff barriers, uneven implementation of policies, and economic disparities among member states. The study concludes that ASEAN plays an important role as a regional institution in facilitating economic cooperation, but its effectiveness is still constrained by structural and institutional limitations.*

Keyword: *ASEAN, Economic Integration, Regional Cooperation, Trade, Investment.*

Abstrak: Penelitian ini membahas perkembangan kerja sama ekonomi ASEAN pasca pembentukan ASEAN Economic Community pada tahun 2015 yang menjadi tonggak integrasi ekonomi kawasan. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana ASEAN berkembang menuju pasar tunggal dan basis produksi melalui peningkatan perdagangan intra kawasan, arus investasi, serta interdependensi ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis capaian dan keterbatasan integrasi ekonomi ASEAN pada periode 2015 hingga 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan resmi, literatur akademik, dan publikasi ekonomi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi ASEAN mengalami peningkatan terutama dalam liberalisasi perdagangan, pertumbuhan investasi, dan integrasi jaringan produksi kawasan. Namun demikian, integrasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat

hambatan non tarif, ketimpangan implementasi kebijakan, serta disparitas ekonomi antarnegara anggota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ASEAN berperan penting sebagai institusi regional dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh kendala struktural dan institusional.

Kata Kunci: ASEAN, Integrasi Ekonomi, Kerja Sama Regional, Perdagangan, Investasi.

PENDAHULUAN

Pembentukan AEC pada 2015 kerap dipahami sebagai tonggak (*milestone*) dalam perjalanan integrasi ekonomi ASEAN karena ia menandai pelembagaan agenda integrasi yang sebelumnya bergerak bertahap dari liberalisasi dan fasilitasi perdagangan menuju kerangka integrasi ekonomi yang lebih sistematis dan terukur. Dalam pengantar kajian komprehensif tentang AEC, Michael G. Plummer dan Chia Siow Yue menegaskan bahwa keputusan politik untuk mewujudkan AEC sudah dipatok jauh sebelum 2015, yakni ketika para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu (Januari 2007) “*decided to create an ASEAN Economic Community (AEC) by 2015.*” Mereka juga menekankan bahwa tonggak ini lahir dari kesadaran bahwa ASEAN perlu “*deepen and hasten its economic integration*” untuk merespons tantangan eksternal dan mempertahankan daya saing kawasan.

Secara historis dan institusional, arah menuju AEC dapat ditelusuri pada proses pembentukan “*ASEAN Community*” yang sejak awal dimaksudkan memiliki pilar ekonomi. Dalam buku suntingan Sanchita Basu Das, dijelaskan bahwa para pemimpin ASEAN pada Bali Concord II (2003) menempatkan AEC sebagai *end goal* dari integrasi ekonomi, dan kemudian tenggat tersebut dipercepat menjadi 2015. Buku yang sama juga menandai KTT ASEAN November 2007 di Singapore sebagai fase penting karena para pemimpin mengadopsi “*AEC Blueprint*” sebagai peta jalan yang memuat target, langkah aksi, dan garis waktu implementasi, termasuk karakteristik inti seperti “*single market and production base.*”

AEC 2015 sering dipotret bukan sekadar label institusional, melainkan peningkatan kualitas integrasi yang melampaui FTA konvensional. Dalam artikel jurnal akses terbuka, Koichi Ishikawa menyatakan secara eksplisit bahwa “*ASEAN realized the ASEAN Economic Community (AEC) at the end of 2015,*” lalu merumuskan tujuan AEC sebagai integrasi ekonomi yang menargetkan arus yang lebih bebas untuk barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta arus modal yang lebih bebas. Dalam artikulasi Ishikawa, AEC diposisikan sebagai bentuk integrasi “*FTA-plus*” yakni integrasi yang tidak berhenti pada penghapusan tarif semata, tetapi mencakup agenda regulasi dan fasilitasi yang lebih luas.

Dari sisi konsep dan kerangka hukum, studi buku Stefano Inama dan Edmund W. Sim membantu menjelaskan mengapa AEC 2015 dianggap tonggak: ia mengikat agenda integrasi pada mandat normatif pasar tunggal dan basis produksi. Mereka mengutip rumusan visi tentang “*single market and production base, which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated,*” sekaligus menegaskan bahwa “*single market*” dan “*single production base*” dipahami sebagai dua konsep yang berbeda dalam kerangka Piagam ASEAN dan teks-teks AEC.

Walaupun demikian, banyak karya akademik juga mengingatkan bahwa 2015 lebih tepat dipahami sebagai penanda fase bukan titik akhir integrasi. Artikel jurnal oleh Peter Widiana dan Agoes Djatmiko menyimpulkan bahwa “*The formal establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) on 31 December 2015 marks a key milestone in ASEAN economic integration journey.*” Sejalan dengan itu, Rodolfo C. Severino dalam foreword buku akademik tentang AEC 2015 menekankan bahwa AEC “*is a work in progress, and 2015, the year of its supposed achievement, is a mere aspirational goal,*” sehingga tonggak 2015 sekaligus membuka ruang bagi evaluasi apakah *milestone* telah tercapai dan agenda lanjutan pasca-2015.

Landasan normatif tujuan AEC tercermin jelas dalam Piagam ASEAN, yang menempatkan penciptaan “pasar tunggal dan basis produksi” sebagai salah satu purposes ASEAN, yakni untuk “*create a single market and production base*” dalam kerangka kawasan yang stabil, sejahtera, kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomi (ASEAN, 2007a). Rujukan Piagam tersebut juga merinci dimensi operasionalnya, mencakup “*free flow of goods, services and investment*”, pergerakan yang difasilitasi bagi pelaku usaha/profesional/talenta/tenaga kerja, serta “*freer flow of capital*” (ASEAN, 2007a). Dengan demikian, sejak desain konstitusional ASEAN, cita-cita AEC diposisikan bukan hanya sebagai pengurangan hambatan tarif, melainkan sebagai agenda integrasi yang menyentuh faktor-faktor produksi dan tata kelola arus lintas-batas (ASEAN, 2007a).

Tujuan tersebut kemudian dioperasionalisasi melalui Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint (diterima dalam KTT ASEAN ke-13), yang menugaskan negara anggota untuk mengadopsi dan mengimplementasikan Blueprint guna mewujudkan AEC pada 2015, serta menegaskan bahwa Blueprint “*will transform ASEAN into a single market and production base*” (ASEAN, 2007b). Di dalam Blueprint, konsep pasar tunggal dan basis produksi didefinisikan secara eksplisit sebagai himpunan elemen inti yang membingkai liberalisasi sekaligus fasilitasi ekonomi kawasan; Blueprint menyatakan bahwa “*shall comprise five core elements*” (ASEAN, 2007b). Lima elemen inti itu adalah *free flow of goods, free flow of services, free flow of investment, freer flow of capital, dan free flow of skilled labour* (ASEAN, 2007b). Selain itu, Blueprint juga menyebut dua komponen penting yang menyertai pasar tunggal dan basis produksi yakni priority integration sectors serta food, agriculture and forestry sehingga agenda integrasi dimaksudkan turut mempengaruhi struktur produksi sektoral dan ketahanan pasokan di kawasan (ASEAN, 2007b).

Secara substantif, desain pasar tunggal di AEC menuntut kombinasi liberalisasi dan fasilitasi lintas-batas serta reformasi *behind-the-border* yang lebih dalam (ASEAN, 2007b). Untuk arus barang, Blueprint menegaskan bahwa AFTA telah mendorong kemajuan penghapusan tarif, namun *free flow of goods* memerlukan bukan hanya tarif nol melainkan juga *removal of non-tariff barriers*, serta fasilitasi perdagangan seperti integrasi prosedur kepabeanan, ASEAN Single Window, penguatan *rules of origin*, dan harmonisasi standar/konformitas (ASEAN, 2007b). Untuk arus jasa, Blueprint mendefinisikan targetnya sebagai kondisi *substantially no restriction to ASEAN services suppliers* dalam penyediaan jasa dan pendirian perusahaan lintas batas dengan penegasan “*subject to domestic regulations*”, disertai prinsip *no back-loading* dalam komitmen liberalisasi serta agenda pengakuan kualifikasi profesional untuk memfasilitasi mobilitas (ASEAN, 2007b).

Untuk investasi, Blueprint menegaskan bahwa “*A free and open investment regime is key to enhancing ASEAN’s competitiveness*” dalam menarik FDI dan investasi intra-ASEAN; ia juga mengaitkan implementasi kerja sama investasi dengan AIA (1998) serta rezim perlindungan investasi yang terpisah, dan menggariskan logika national treatment dengan pengecualian tertentu (ASEAN, 2007b). Untuk modal, Blueprint menggambarkan *freer flow of capital* melalui penguatan pengembangan dan integrasi pasar modal misalnya harmonisasi standar dan fasilitasi keterkaitan pasar, sembari menetapkan prinsip liberalisasi yang tertib, kesiapan domestik, serta safeguards atas risiko stabilitas makro dan sistemik (ASEAN, 2007b). Untuk tenaga kerja terampil, Blueprint tidak mendesain mobilitas penuh tanpa batas, melainkan “*managed mobility or facilitated entry*” dan penekanan pada fasilitasi visa serta employment passes bagi profesional dan tenaga kerja terampil yang terlibat dalam aktivitas perdagangan/investasi lintas-batas (ASEAN, 2007b).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kerja sama ekonomi ASEAN pasca pembentukan AEC pada periode 2015–2025?. Analisis memetakan apakah tujuan pasar tunggal dan basis produksi yang Blueprint rumuskan “*shall comprise five core elements*” (barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal) tercermin pada

perubahan pangsa perdagangan intra-ASEAN, kinerja fasilitasi perdagangan, serta keterkaitan jaringan produksi kawasan (ASEAN, 2007a; ASEAN, 2007b; Plummer and Chia, 2009). Dimensi investasi diuji melalui tren FDI dan investasi intra-ASEAN sebagai indikator daya tarik basis produksi regional dan posisi ASEAN dalam rantai nilai global (Plummer and Chia, 2009; Ishikawa, 2021). Pada saat yang sama, penelitian menilai implementasi mekanisme pemantauan dan *scorecard*) serta NTMs dan harmonisasi regulasi sebagai faktor yang dapat menahan integrasi meski kerangka kerja formal tersedia (ASEAN, 2007b; Ravenhill, 2008; Inama and Sim, 2015). Terakhir, studi menilai apakah hasil integrasi 2015–2025 cenderung tidak merata karena kesenjangan pembangunan antaranggota, sehingga temuannya relevan untuk prioritas kebijakan (penurunan NTMs, penguatan implementasi, dan penutupan kesenjangan pembangunan) agar integrasi lebih dalam sekaligus inklusif (ASEAN, 2007a; ASEAN, 2007b; Chia, 2011; Ishikawa, 2021).

METODE

Untuk memahami perkembangan kerja sama ekonomi di ASEAN, penelitian ini menggunakan perspektif teori Neoliberalisme Institusional. Teori ini menekankan bahwa kerja sama antarnegara tetap mungkin terjadi meskipun sistem internasional bersifat anarkis, selama terdapat institusi yang mampu mengatur interaksi tersebut. Menurut tokoh neoliberalisme Robert Keohane (1984), institusi internasional berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi antarnegara. Dengan adanya aturan, norma, dan mekanisme yang jelas, negara dapat lebih mudah bekerja sama karena risiko konflik dan ketidakpastian dapat diminimalkan (Keohane & Martin, 1995).

Bagian metode penelitian dalam kajian mengenai perkembangan kerja sama ekonomi ASEAN pasca pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) perlu disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mampu menjawab rumusan masalah secara tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, karena fokus utama penelitian adalah memahami dinamika kerja sama ekonomi regional ASEAN serta menjelaskan peran institusi dalam proses integrasi ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam hubungan antarnegara, peran institusi, serta mekanisme kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2014).

Jenis penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi ASEAN. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi publikasi dari ASEAN Secretariat, laporan lembaga internasional seperti World Bank dan WTO, serta artikel jurnal yang relevan dengan topik integrasi ekonomi regional. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini tidak memerlukan data lapangan, melainkan analisis terhadap kebijakan, konsep, dan perkembangan kerja sama ekonomi yang telah terdokumentasi (Zed, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen resmi dan literatur akademik yang berkaitan dengan ASEAN Economic Community, mekanisme kerja sama ekonomi regional, serta teori Neoliberal Institutionalism. Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, dengan mengutamakan jurnal bereputasi dan laporan resmi institusi internasional untuk menjaga validitas penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan peran institusi ASEAN dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi

analitis untuk melihat pola, hubungan, serta dinamika integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori Neoliberal Institutionalism. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai data dari sumber yang berbeda guna meningkatkan keakuratan dan konsistensi temuan (Denzin, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) selama periode 2015–2025 ditandai oleh upaya sistematis untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi kawasan yang terintegrasi. Konsep ini mencakup liberalisasi arus barang, jasa, investasi, serta mobilitas tenaga kerja terampil. Dalam kerangka ini, ASEAN berupaya mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi kawasan secara kolektif. Namun, meskipun kerangka kelembagaan telah terbentuk dengan cukup baik, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan kesiapan institusional antarnegara anggota.

Pengurangan tarif melalui ASEAN Trade in Goods Agreement menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan. Sebagian besar negara anggota ASEAN telah berhasil menurunkan tarif intra-kawasan hingga mendekati nol persen untuk mayoritas produk. Hal ini secara signifikan menurunkan biaya perdagangan dan meningkatkan daya saing kawasan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak sepenuhnya optimal karena masih adanya hambatan non-tarif yang cukup signifikan. Ing et al. (2022) menyatakan bahwa *“tariff liberalization under ATIGA has been largely successful, but its impact is diluted by persistent non-tariff measures,”* yang menunjukkan bahwa keberhasilan penghapusan tarif belum diimbangi dengan pengurangan hambatan lainnya.

Selain liberalisasi tarif, ASEAN juga mendorong harmonisasi regulasi ekonomi sebagai bagian dari upaya memperdalam integrasi pasar. Harmonisasi ini mencakup penyelarasan standar teknis, regulasi produk, prosedur kepabeanan, serta kebijakan investasi antarnegara anggota. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, proses ini berjalan relatif lambat karena adanya perbedaan sistem hukum, kapasitas birokrasi, serta prioritas kebijakan nasional di masing-masing negara. Kondisi ini menyebabkan integrasi regulasi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menciptakan keseragaman kebijakan di kawasan.

Keterbatasan implementasi di tingkat nasional menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas AEC. Banyak kebijakan regional yang telah disepakati di tingkat ASEAN tidak sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di tingkat domestik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan kapasitas institusional, resistensi politik domestik, serta perbedaan kepentingan ekonomi nasional. World Bank (2022) menegaskan bahwa *“national-level implementation gaps continue to hinder the effectiveness of ASEAN economic agreements,”* yang menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen regional dan praktik nasional. Dengan demikian, keberhasilan AEC tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan regional, tetapi juga pada komitmen dan kapasitas negara anggota dalam mengimplementasikannya.

Perdagangan intra-ASEAN mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan implementasi berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan di kawasan. Peningkatan ini mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi antarnegara anggota, terutama dalam konteks rantai pasok regional dan produksi lintas batas. Integrasi ini juga mendorong spesialisasi produksi dan peningkatan efisiensi ekonomi di kawasan. Meskipun demikian, kontribusi perdagangan intra-ASEAN terhadap total perdagangan kawasan masih relatif terbatas dibandingkan dengan perdagangan eksternal. Asian Development Bank (2023) menyatakan bahwa *“intra-ASEAN trade has grown steadily,*

but its share remains modest compared to total trade,” yang menunjukkan bahwa integrasi perdagangan internal belum sepenuhnya dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi perdagangan intra-kawasan masih belum dimanfaatkan secara optimal.

ASEAN juga telah berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan global yang penting, terutama dalam jaringan produksi internasional atau global value chains. Kawasan ini memainkan peran strategis dalam produksi barang manufaktur, khususnya di sektor elektronik, otomotif, dan tekstil. Posisi ini didukung oleh keunggulan komparatif kawasan, seperti biaya tenaga kerja yang relatif kompetitif dan lokasi geografis yang strategis dalam perdagangan global. Namun, meskipun terjadi peningkatan perdagangan intra-kawasan, ASEAN masih sangat bergantung pada mitra perdagangan eksternal. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara ASEAN. UNESCAP (2022) mencatat bahwa *“ASEAN economies remain highly dependent on extra-regional trade partners despite regional integration efforts,”* yang menunjukkan bahwa integrasi regional belum mampu sepenuhnya mengurangi ketergantungan terhadap pasar global. Hal ini menegaskan bahwa integrasi ASEAN bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap perdagangan internasional.

Arus investasi asing langsung (FDI) ke ASEAN menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2015–2025. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, pasar domestik yang besar, serta kebijakan investasi yang semakin terbuka dan pro-bisnis. Selain itu, integrasi ekonomi kawasan melalui AEC juga meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi global. ASEAN kini semakin diakui sebagai salah satu destinasi utama investasi global. United Nations Conference on Trade and Development menyatakan bahwa *“ASEAN continues to attract strong FDI inflows, supported by its economic dynamism and integration initiatives”* (UNCTAD, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN memiliki daya tarik struktural yang kuat bagi investor internasional, terutama dalam sektor manufaktur, infrastruktur, dan ekonomi digital.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital di kawasan turut memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat investasi baru. Pertumbuhan sektor e-commerce, fintech, dan industri berbasis teknologi telah menarik minat investor global untuk menanamkan modal di kawasan ini. Hal ini menunjukkan adanya transformasi struktural dalam ekonomi ASEAN menuju ekonomi berbasis inovasi. Namun, distribusi investasi di ASEAN masih terkonsentrasi di negara-negara tertentu, seperti Singapura dan Vietnam. Negara-negara ini memiliki keunggulan dalam hal stabilitas politik, kualitas infrastruktur, serta kemudahan berusaha. Asian Development Bank (2022) mencatat bahwa *“FDI inflows in ASEAN are unevenly distributed, reflecting differences in competitiveness and investment climate,”* yang menunjukkan bahwa ketimpangan struktural masih menjadi tantangan dalam integrasi ekonomi Kawasan.

Salah satu hambatan utama dalam integrasi ekonomi ASEAN adalah keberadaan Non-Tariff Measures (NTMs). Meskipun tarif telah diturunkan secara signifikan, berbagai bentuk hambatan non-tarif seperti regulasi teknis, standar produk, dan prosedur administratif masih membatasi arus perdagangan. Ing et al. (2022) menyatakan bahwa *“non-tariff measures have become the primary trade barriers in ASEAN,”* yang menunjukkan bahwa hambatan perdagangan kini lebih banyak berasal dari regulasi domestik dibandingkan tarif. Disparitas ekonomi antarnegara anggota juga menjadi tantangan signifikan dalam integrasi kawasan. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas industri, dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat integrasi. Negara-negara dengan ekonomi lebih maju cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan negara berkembang.

Keterbatasan koordinasi kebijakan juga menghambat efektivitas integrasi ekonomi ASEAN. Prinsip konsensus dan non-intervensi yang dianut ASEAN seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan bersama. Hal ini menyebabkan

respons terhadap tantangan ekonomi menjadi kurang cepat dan kurang terkoordinasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas institusional yang belum merata di seluruh negara anggota memperburuk kesenjangan integrasi. World Bank (2021) menyatakan bahwa *“infrastructure deficits and institutional weaknesses are major barriers to ASEAN connectivity and integration,”* yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan institusi menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan integrasi ekonomi ASEAN ke depan.

Dalam perspektif Neoliberal Institutionalism, keberadaan ASEAN dapat dipahami sebagai institusi yang berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi antarnegara serta memfasilitasi kerja sama yang saling menguntungkan. Institusi ini menyediakan seperangkat norma, aturan, dan mekanisme yang memungkinkan negara anggota untuk mengoordinasikan kebijakan ekonomi mereka secara lebih efektif. Melalui forum seperti ASEAN Summit, ASEAN Economic Community (AEC), serta berbagai perjanjian perdagangan regional, ASEAN mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja sama ekonomi.

Lebih jauh, ASEAN juga berperan dalam membangun kepercayaan (trust-building) antarnegara anggota, yang merupakan elemen penting dalam perspektif neoliberal institusionalisme. Dengan adanya mekanisme dialog rutin dan konsultasi kebijakan, potensi konflik dapat diminimalkan dan digantikan dengan kerja sama yang lebih stabil. Intal dan Pangestu (2021) menegaskan bahwa *“ASEAN institutions play a critical role in fostering cooperation by providing rules and platforms for economic engagement,”* yang menunjukkan bahwa keberadaan institusi regional memiliki peran strategis dalam mendorong integrasi ekonomi. Namun demikian, karakteristik kelembagaan ASEAN yang berbasis pada prinsip konsensus dan non-intervensi juga membatasi efektivitasnya dalam memaksakan kepatuhan terhadap aturan bersama. Hal ini membuat ASEAN lebih berfungsi sebagai fasilitator daripada otoritas supranasional yang memiliki kekuatan mengikat secara kuat seperti Uni Eropa. Dengan demikian, efektivitas ASEAN sangat bergantung pada komitmen sukarela negara anggotanya.

Kerja sama ekonomi dalam kerangka ASEAN telah mendorong peningkatan interdependensi antarnegara anggota secara signifikan. Interdependensi ini tercermin dalam meningkatnya arus perdagangan intra-kawasan, investasi lintas negara, serta integrasi dalam rantai pasok regional. Negara-negara ASEAN tidak lagi beroperasi sebagai entitas ekonomi yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi regional yang saling terhubung.

Peningkatan interdependensi ini juga terlihat dalam spesialisasi produksi di antara negara anggota. Beberapa negara berfokus pada sektor manufaktur, sementara yang lain mengembangkan sektor jasa atau sumber daya alam, sehingga menciptakan hubungan saling ketergantungan yang memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Asian Development Bank (2023) menyatakan bahwa *“economic integration has deepened interdependence among ASEAN economies through trade and investment linkages,”* yang menegaskan bahwa integrasi ekonomi telah memperkuat hubungan timbal balik antarnegara.

Selain itu, interdependensi ekonomi juga meningkatkan insentif bagi negara anggota untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan. Ketergantungan terhadap pasar regional membuat negara-negara ASEAN memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kelancaran arus perdagangan dan investasi. Dengan demikian, interdependensi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas kawasan secara keseluruhan. Interdependensi ini juga membawa risiko, terutama dalam konteks guncangan ekonomi global. Ketergantungan yang tinggi antarnegara dapat menyebabkan dampak krisis ekonomi menyebar lebih cepat di dalam kawasan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi kebijakan yang lebih kuat untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Meskipun ASEAN telah berhasil membangun kerangka kerja sama ekonomi yang relatif komprehensif, efektivitas institusinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara komitmen regional dan implementasi di

tingkat nasional. Banyak kebijakan yang telah disepakati di tingkat ASEAN tidak sepenuhnya diadopsi atau dijalankan secara konsisten oleh negara anggota. Perbedaan kapasitas institusional menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan implementasi tersebut. Negara dengan kapasitas birokrasi yang lebih kuat cenderung lebih mampu mengimplementasikan kebijakan regional dibandingkan negara dengan kapasitas yang lebih terbatas. World Bank (2022) menyatakan bahwa “*implementation gaps across member states continue to limit the effectiveness of ASEAN institutions,*” yang menunjukkan bahwa tantangan utama ASEAN terletak pada aspek implementasi kebijakan.

Selain itu, prinsip non-intervensi yang menjadi dasar kerja sama ASEAN juga membatasi kemampuan institusi ini untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan bersama. Tidak adanya mekanisme sanksi yang kuat membuat implementasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen sukarela negara anggota. Hal ini menyebabkan integrasi ekonomi berjalan dengan kecepatan yang tidak merata. Keterbatasan koordinasi kebijakan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas institusi ASEAN. Perbedaan kepentingan nasional seringkali menghambat tercapainya kesepakatan yang lebih ambisius, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat kompromi dan kurang optimal.

Integrasi ekonomi ASEAN menunjukkan pola yang tidak merata di antara negara anggota. Negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, seperti Singapura dan Malaysia, cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dari integrasi regional dibandingkan negara berkembang seperti Laos, Kamboja, atau Myanmar. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas dalam kapasitas ekonomi, kualitas infrastruktur, serta tingkat kesiapan institusional. Perbedaan ini juga terlihat dalam distribusi investasi asing langsung (FDI) yang cenderung terkonsentrasi di negara-negara dengan iklim investasi yang lebih kondusif. Negara-negara yang memiliki infrastruktur yang baik, stabilitas politik, dan kebijakan pro-investasi lebih mampu menarik investor dibandingkan negara yang masih menghadapi berbagai kendala struktural.

UNESCAP (2022) mencatat bahwa “*the benefits of regional integration in ASEAN are unevenly distributed across member states,*” yang menunjukkan bahwa integrasi ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antarnegara anggota jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat. Selain itu, integrasi yang tidak merata juga dapat menimbulkan tantangan politik dalam kerja sama regional. Negara-negara yang merasa kurang mendapatkan manfaat dari integrasi mungkin menjadi kurang berkomitmen terhadap kebijakan regional, sehingga dapat menghambat proses integrasi secara keseluruhan.

Ke depan, ASEAN memiliki prospek yang cukup besar untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan, terutama dengan meningkatnya peran kawasan Asia dalam ekonomi global. Namun, untuk mencapai integrasi yang lebih efektif dan inklusif, diperlukan berbagai upaya perbaikan dalam kerangka kerja sama yang ada. Salah satu langkah penting adalah memperkuat koordinasi kebijakan antarnegara anggota, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Harmonisasi regulasi juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Selain itu, pengurangan hambatan non-tarif (NTMs) menjadi prioritas utama dalam memperdalam integrasi ekonomi. Ing et al. (2022) menegaskan bahwa “*reducing non-tariff barriers is essential for advancing deeper economic integration in ASEAN,*” yang menunjukkan bahwa fokus kebijakan ke depan harus diarahkan pada penghapusan hambatan non-tarif yang masih menjadi penghalang utama perdagangan. Penguatan infrastruktur dan kapasitas institusional di negara-negara yang kurang berkembang juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa manfaat integrasi dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan mengurangi kesenjangan ekonomi antarnegara anggota, ASEAN dapat menciptakan integrasi yang lebih

inklusif dan berkelanjutan. Dengan berbagai upaya tersebut, ASEAN berpotensi untuk memperkuat posisinya sebagai kawasan ekonomi yang dinamis dan kompetitif di tingkat global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Perkembangan Kerja Sama Ekonomi ASEAN Pasca Pembentukan ASEAN Economic Community (2015–2025)*, dapat disimpulkan bahwa pembentukan AEC telah mendorong peningkatan integrasi ekonomi kawasan, khususnya melalui liberalisasi perdagangan, peningkatan arus investasi, serta penguatan keterkaitan dalam jaringan produksi regional. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama AEC dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi mulai tercermin dalam peningkatan perdagangan intra-ASEAN, arus FDI, serta interdependensi ekonomi antarnegara anggota. Namun demikian, pencapaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan struktural, seperti keberadaan hambatan non-tarif, kesenjangan implementasi kebijakan di tingkat nasional, serta disparitas tingkat pembangunan antarnegara anggota.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa keberadaan ASEAN sebagai institusi regional, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif neoliberalisme institusional, berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi dengan menyediakan kerangka aturan dan mekanisme koordinasi. Meskipun demikian, efektivitas institusi tersebut masih terbatas oleh prinsip konsensus dan non-intervensi yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak merata dan sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota. Akibatnya, integrasi ekonomi ASEAN cenderung bersifat bertahap dan tidak seragam di seluruh kawasan.

Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ekonomi regional maupun teknik industri secara umum, penelitian ini menunjukkan pentingnya perbaikan pada aspek efisiensi sistem, harmonisasi standar, serta penguatan koordinasi lintas sistem produksi dan distribusi. Upaya pengurangan hambatan non-tarif, peningkatan integrasi infrastruktur, serta standardisasi regulasi dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok regional dan menurunkan biaya transaksi, yang merupakan prinsip penting dalam optimasi sistem industri. Selain itu, penguatan kapasitas institusional dan pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi kawasan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat integrasi tidak hanya terkonsentrasi pada negara tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata di seluruh kawasan ASEAN

REFERENSI

- Asian Development Bank. (2023). *Asian economic integration report 2023*. <https://www.adb.org/publications/asian-economic-integration-report-2023>
- Association of Southeast Asian Nations. (2007a). *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/21069.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations. (2007b). *ASEAN economic community blueprint*. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/21083.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations. (2015). *ASEAN economic community blueprint 2025*. ASEAN Secretariat. <https://afcwp.asean.org/wp-content/uploads/2020/09/ANNEX-6-AEC-Blueprint-2025.pdf>
- Basu Das, S. (Ed.). (2012). *Achieving the ASEAN economic community 2015: Challenges for member countries and businesses*. ISEAS Publishing.
- Chia, S. Y. (2011). Association of Southeast Asian Nations economic integration: Developments and challenges. *Asian Economic Policy Review*, 6(1), 43–63. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2011.01178.x>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>

- Hill, H. (2014). Is there a Southeast Asian development model? *ASEAN Economic Bulletin*, 31(1), 1–18.
- Inama, S., & Sim, E. W. (2015). *The foundation of the ASEAN economic community: An institutional and legal profile*. Cambridge University Press.
- Ing, L. Y., Peters, R., & Cadot, O. (2022). Non-tariff measures and ASEAN economic integration. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(2), 150–168. <https://doi.org/10.1355/ae39-2c>
- Intal, P., & Pangestu, M. (2021). *The ASEAN economic community: Progress and challenges*. ASEAN Secretariat. <https://asean.org>
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN economic community and ASEAN economic integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2012). The ASEAN Economic Community: A general equilibrium analysis. *Asian Economic Journal*, 26(2), 93–118.
- Plummer, M. G., & Chia, S. Y. (2009). Introduction. In *Realizing the ASEAN economic community: A comprehensive assessment*.
- Ravenhill, J. (2008). Fighting irrelevance: An economic community “with ASEAN characteristics”. *The Pacific Review*, 21(4), 469–488. <https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstreams/ce280967-e10d-48d5-9bf9-ec3e2c67d74f/download>
- Severino, R. C. (2012). Foreword. In S. Basu Das (Ed.), *Achieving the ASEAN economic community 2015: Challenges for member countries and businesses*. ISEAS Publishing.
- United Nations ESCAP. (2022). *Asia-Pacific trade and investment report 2022*. <https://www.unescap.org>
- Widyana, P., & Djatmiko, A. (2019). The role of Indonesia in the ASEAN economic community. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(4).
- World Bank. (2022). *ASEAN economic integration report*. <https://www.worldbank.org>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.